



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNUL MARAM
2. Jabatan : KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
3. NHK : 969623

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **19.642.300.000**

1. Tanah Seluas 3.022 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 1.057.700.000
2. Tanah Seluas 1.393 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 487.550.000
3. Tanah Seluas 1.524 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 533.400.000
4. Tanah Seluas 601 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 210.350.000
5. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 83.300.000
6. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 39.900.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/360 m2 di KAB / KOTA GRESIK, Rp. 9.207.000.000
8. Tanah Seluas 1.705 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 800.000.000
9. Tanah Seluas 4.447 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 5.781.100.000
10. Tanah Seluas 1.205 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 442.000.000
11. Tanah Seluas 3.851 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI



Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

230.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

441.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

709.575.823

F. HARTA LAINNYA

Rp.

60.180.104

Sub Total

Rp.

21.083.055.927

III. HUTANG

Rp.

543.889.302

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

20.539.166.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.